



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADAN ROSANA**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **694231**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 559.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/300 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 39.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 393.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
5. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 32.456.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	984.956.000
III. HUTANG	Rp.	183.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	801.956.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.